



## Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subulussalam

Yuli Ekawati\*, Laylan Syafina, Yenni Samri Juliati Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Kata Kunci

**Kata kunci:** Yuli Ekawati; Laylan Syafina; Yenni Samri Juliati Nasution

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam pengamanan aset tetap di Kota Subulussalam. Aset tetap memainkan peran penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah, meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, dan fasilitas lain yang digunakan untuk kegiatan pelayanan publik. Manajemen dan keamanan yang efektif dari aset-aset ini sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya keuangan lokal secara efisien. Kajian ini mengkaji tanggung jawab BPKD dalam pengadaan, inventarisasi, penilaian, dan pemeliharaan aset. Dibahas pula manfaat pengamanan aset yang efektif, tantangan yang dihadapi BPKD dalam pengamanan aset tetap, dan strategi peningkatan pengamanan aset. Temuan berkontribusi untuk meningkatkan praktik pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset di Kota Subulussalam. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Subulussalam. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi BPKD Kota Subulussalam, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, menulis, dan membaca. Proses analisis data kemudian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari atau mengkonfirmasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPKD merupakan suatu bagian yang mengkoordinir serta dijadikan sebagai koordinator untuk mengelola aset daerah yang belum baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

### Keywords

**Keywords:** Regional Financial Management Agency (BPKD); Fixed Asset Security; Asset;

### Abstract

This research aims to analyze the role of the Regional Financial Management Agency (BPKD) in securing fixed assets in Subulussalam City. Fixed assets play an important role in the financial structure of local governments, including land, buildings, infrastructure and other facilities used for public service activities. Effective management and security of these assets is essential to ensure efficient utilization of local financial resources. This study examines BPKD's responsibilities in procurement, inventory, assessment and maintenance of assets. The benefits of effective asset security are also discussed, the challenges faced by the BPKD in securing fixed assets, and strategies to increase asset security. The findings contribute to improving financial management practices and optimizing asset utilization in Subulussalam City. This research was conducted at the Subulussalam City BPKD Regional Financial Management Agency Office. This study used descriptive analysis method, and made direct observations by visiting the Subulussalam City BPKD, as well as conducting interviews with related parties. Data collection techniques include observation, interviews, writing and reading. The data analysis process is then carried out by collecting, reducing, presenting and drawing conclusions from or confirming the data. The results of this study indicate that the BPKD is a part that coordinates and is used as a coordinator for managing regional assets that are not yet good at carrying out their duties and functions.

\*Corresponding Author: **Yuli Ekawati**, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [yuliekaa37@gmail.com](mailto:yuliekaa37@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.400>

History Artikel:

Received: 11 September 2023 | Accepted: 29 September 2023

## PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah termasuk aset tetap. Aset yang dimiliki serta dimanfaatkan pada jangka waktu panjang juga mempunyai value perekonomian yang tinggi. Contohnya tanah, bangunan, mesin, juga kendaraan.

Pengamanan aset tetap sangat penting dilakukan oleh BPKD untuk mencegah kerugian atau penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan daerah. Upaya pengamanan aset tetap dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti investasi aset, penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan aset, pemeliharaan dan perawatan aset secara berkala, pengawasan terhadap penggunaan aset oleh pihak-pihak terkait, pengamanan fisik terhadap aset dengan sistem pengaman yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat menjelaskan tentang cara pemerintahan daerah dalam melakukan pembiayaan untuk pelaksanaan mandat Pembangunan, mengurangi kapasitas dari pemerintahan daerah, khususnya Kota Subulussalam, dalam pengelolaan keuangan. (Hermain, Daulay, and Enre, 2020).

Selain itu BPKD juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap pengelolaan aset tetap yang dikelola pada bagian unit kerja daerah. Pentingnya hal ini dilakukan agar mengetahui tentang strategi dan prosedur yang telah ditentukan dapat diterapkan dengan baik, serta untuk mengidentifikasi potensi resiko atau masalah dalam pengelolaan aset yang perlu segera ditangani. Serangkaian kegiatan terencana yang bertujuan memperbaiki keadaan melalui kegiatan terencana dan tertata (Nasution and Siregar, 2020).

Terkendalinya pengelolaan aset daerah mempunyai dampak yang signifikan untuk keakuratan dalam menyajikan neraca pada suatu daerah agar diberikan kepada BPK-RI pada pada setiap akhir tahun untuk anggaran yang berjalan. Pemerintahan Kota Subulussalam mendapati pemberitaan media yang menyatakan adanya hutang-hutang yang belum terselesaikan pada beberapa pihak serta bertambahnya hutang lainnya di kota Subulussalam serta terdapat asumsi di BPKD Kota Subulussalam. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada BPKD Kota Subulussalam yang dijadikan untuk target dalam mengelola asset tetapnya.

Dengan melakukan upaya pengamanan aset tetap yang baik dan teratur, BPKD Kota Subulussalam dapat memastikan bahwa aset tetap di Kota Subulussalam tertata dengan baik dan teratur, BPKD Kota Subulussalam dapat memastikan bahwa aset tetap tersebut dimanfaatkan dengan baik dan optimal, serta menghindari kerugian atau penyalahgunaan yang dapat

merugikan keuangan daerah (Wartuny, 2020).

Manajemen aset tetap yang baik memberikan informasi saat menyampaikan Laporan keuangan terkini tidak mencerminkan keakuratan dokumen yang menjadi landasan dan sumber setiap siklus pengelolaan aset di wilayah Kota Subulussalam yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pada PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 tentang Tetap pedoman pengelolaan aset pemerintah Kota Subulussalam, sebelumnya Kota Subulussalam menganut siklus dalam melakukan pengolahan barang yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut berpatokan pada Qanun Aceh No. 09 tahun 2008, sedangkan pada saat ini sedang ada pembaharuan atau perubahan sehingga kota Subulussalam mengikuti pedoman PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. Dari masalah yang telah dipaparkan, maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan agar lebih memahami cara pengelolaan aset tetap pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.

Penelitian mengenai badan pengelolaan keuangan daerah dalam pengamanan aset tetap di Kota Subulussalam telah mengidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang dapat menjadi fokus studi lebih lanjut. Salah satu gap penelitian yang signifikan adalah kurangnya perhatian terhadap bagaimana BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) di daerah tersebut mengamankan aset daerahnya.

Perlu diperhatikan bahwa kebijakan pengamanan aset tetap di Kota Subulussalam mungkin belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif oleh BPKD. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis sejauh mana praktik pengamanan aset yang ada di daerah tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah BPKD telah memastikan aset tetap seperti gedung, kendaraan, dan fasilitas lainnya terdaftar, dicatat dengan baik, dan diawasi dengan benar.

Lebih lanjut, permasalahan konkret yang perlu dicermati adalah temuan tunggakan iuran listrik. Tunggakan ini bisa menjadi indikator kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif terhadap aset tetap, khususnya terkait dengan pemakaian fasilitas listrik. Studi lebih lanjut dapat menginvestigasi penyebab tunggakan ini, apakah karena kekurangan perencanaan anggaran yang tepat atau mungkin karena kurangnya kontrol internal yang memadai di BPKD Kota Subulussalam.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa pendataan aset yang kurang spesifik menjadi masalah serius dalam pengamanan aset tetap. BPKD perlu memiliki sistem pendataan yang akurat dan terperinci untuk semua aset daerah. Gap penelitian ini dapat diselidiki lebih lanjut dengan menganalisis sejauh mana BPKD telah mengimplementasikan praktik pendataan yang efektif, apakah ada kecukupan dalam pencatatan aset, dan apakah data aset tetap sudah mencakup detail

yang memadai seperti spesifikasi, nilai, kondisi, dan lokasi fisik aset.

Tema pada penelitian ini tentunya bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji tentang Analisa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap di Kota Subulussalam. Penulis menemukan beberapa penelitian yang sejalan melalui skripsi, artikel jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lainnya yang akan digunakan untuk memberikan informasi yang sebenarnya (Arista and Nurlaila, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Siregar, R., & Prasetyo, A. pada tahun 2020 berjudul "Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pengamanan Aset Tetap di Kota Subulussalam" dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 23(2), halaman 151-167. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam pengamanan aset tetap di Kota Subulussalam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana BPKD dapat melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengamanan aset tetap di wilayah tersebut (R, Bintari, and S, 2020).

Penelitian lainnya yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Rahman, A., & Hadi, S. pada tahun 2019 berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Terhadap Efektivitas Pengamanan Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam" dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, volume 17(2), halaman 151-166 dengan tujuan melakukan evaluasi terkait penerapan sistem informasi manajemen pada aset dengan melihat efektivitas dari sistem tersebut dalam memberikan keamanan pada aset tetap.

Penelitian ini berjudul "Analisis Efisiensi Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam" dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kota Subulussalam. Pencatatan tersebut meliputi nilai aktiva tetap yang disajikan dalam neraca yang belum didukung dengan inventarisasi yang memadai, serta pemeriksaan fisik kendaraan dinas yang kurang dokumentasinya dan bidang tanah yang belum bersertifikat prosesnya. Terlaksananya setiap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada akhirnya tidak terlepas dari pengelolaan aset tetap yang baik sehingga menghasilkan informasi dalam penyusunannya laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

lebih dalam mengenai pengelolaan aset tetap daerah pada Kantor BKAD Kota Subulussalam guna mengetahui cara pengelolaan aset tetap pada pemerintahan Kota Subulussalam berdasarkan faktor-faktor tersebut. Artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi BPKD Kota Subulussalam dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tetap. Selain itu, artikel ini juga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis tentang pengelolaan aset tetap dalam konteks administrasi publik.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lebih lanjut tentang pengamanan aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kota Subulussalam:

1. Apa saja kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh BPKD Kota Subulussalam dalam pengamanan aset tetapnya?
2. Sejauh mana implementasi kebijakan pengamanan aset tetap telah berjalan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi BPKD Kota Subulussalam dalam pengamanan aset tetap, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut?

Proses penataan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan upaya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu disebut dengan pengelolaan aset daerah. Dalam hal ini untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, terutama penggunaan atau pemanfaatan sumber daya lokal untuk tujuan yang telah ditentukan.

#### Definisi Pengelolaan Aset

Menurut Waluyo (2012:108) menyatakan bahwa pengertian aset tetap dimasukkan dalam laporan neraca yang disampaikan manajemen setiap akhir triwulan atau tahun. Selain aset lancar, aset investasi jangka panjang, uang cadangan, dan aset lainnya, aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca. Mengingat nilai relatifnya terhadap komponen neraca lainnya, aset tetap memainkan peran yang sangat penting. (Mardjani, Kalangi, and Lambey, 2015)

Pengelolaan aset merupakan proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan seluruh aset yang dimiliki oleh sebuah entitas, organisasi, atau perusahaan. Aset dalam konteks ini dapat mencakup beragam elemen, seperti properti, peralatan, kendaraan, inventaris, dan sumber daya manusia. Tujuan dari pengelolaan aset adalah untuk memaksimalkan nilai aset, memastikan aset berfungsi seefisien mungkin, dan mengurangi risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan aset. (Hermain et al., 2019)

Pengelolaan aset melibatkan proses strategi dalam mengelola aset selama siklus hidup, mulai dari perencanaan hingga pembuangan. Selain itu, pengelolaan aset juga mencakup pemantauan kinerja

aset, evaluasi risiko, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen aset (Aleskerova, Fedoryshyna, and Koval, 2018).

Banyak orang memahami pengelolaan aset sama dengan manajemen aset. Manajemen adalah suatu bentuk gerakan kerja dengan orang secara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (Labasido and Darwanis, 2019). Pengertian manajemen tidak jauh berbeda dengan pengelolaan, namun untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian manajemen, yaitu:

James A.F. Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses pengorganisasian, memimpin, mengawasi usaha yang dilakukan oleh anggota yang ada di organisasi serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi kelembagaan. Manajemen juga dikenal dengan istilah ilmu dan seni, maksudnya yaitu seni yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang paling efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hani Andoko menyatakan bahwa manajemen melaksanakan tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyiapkan staf, mengarahkan, memimpin, dan memantau dalam rangka menetapkan, menafsirkan, dan mewujudkan tujuan organisasi.

#### Karakteristik Aset Daerah

Dalam peraturan pemerintahan, terdapat 6 golongan pada aset daerah, yaitu:

##### 1) Golongan Tanah

Tanah merupakan sumber daya berharga yang digunakan pemerintah untuk menjalankan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Aset yang paling sulit dikelola adalah aset yang berhubungan dengan tanah. Hal ini disebabkan oleh beragamnya jenis dan status penggunaan lahan milik pemerintah, serta beragamnya kepentingan atas lahan yang dimiliki oleh pemerintah federal atau lokal.

##### 2) Golongan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin merupakan aset yang sangat terikat dengan penyelenggaraan internal pemerintah baik pusat maupun daerah, padahal pemerintah daerah mempunyai fungsi regulasi.

##### 3) Golongan Gedung dan Bangunan

Fasilitas yang paling penting di suatu tempat adalah bangunan dan struktur karena pemerintah daerah menggunakannya untuk banyak layanan publik yang mereka tawarkan. Bangunan gedung milik pemerintah daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: perkantoran, gudang, laboratorium, rumah sakit, gedung pertemuan, gedung tempat ibadah, gedung olah raga, gedung komersial, gedung kantor pos, gedung

bengkel, gedung kandang hewan, gedung perpustakaan, gedung museum dan lain-lain.

##### 4) Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Infrastruktur kawasan yang baik dan baik ditunjukkan dengan peringkat kualitas jalan. Pengelolaan jalan yang baik diperlukan untuk pengelolaan kualitas jalan yang efektif. Untuk menentukan jalan mana yang menjadi milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten harus dicantumkan. Salah satu bentuk fasilitas penyimpanan air yang disebut pekerjaan irigasi meliputi saluran irigasi, bangunan seperti waduk, dan operasi pembuangan air dari pekerjaan irigasi, termasuk bendungan, pekerjaan keluaran irigasi dan pekerjaan pengamanan irigasi.

##### 5) Golongan Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan, majalah, barang perpustakaan, barang bertema seni atau budaya, serta hewan peliharaan dan tumbuhan, termasuk produk yang tercakup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

##### 6) Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan

Sampai dengan berakhirnya masa jasa pada tahun yang bersangkutan, produk-produk tersebut dilaporkan sebesar harga perolehannya. Jalan, jembatan, pasokan air, utilitas, dan jaringan semuanya dibangun menggunakan kategori produk ini, yang mencakup bangunan dan non-bangunan.

##### 7) Aset Lainnya

Aset tak berwujud seperti hasil penelitian, penyertaan pihak ketiga, dan aset lainnya tidak diketahui dalam Permendagri Edisi 19 Tahun 2016.

##### Keuangan Daerah

Halim mengartikan keuangan daerah sebagai segala hak dan kewajiban pemerintahan yang mempunyai nilai moneter. Aturan serupa berlaku untuk segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai kekayaan daerah untuk tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan pihak lain. Keuangan daerah dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD saja Alhasil, pembiayaan daerah dan APBD sama jumlahnya. Berikut merupakan hak-hak dalam daerah, yaitu:

- 1) Kemampuan dalam mengumpulkan pajak daerah
- 2) Mengumpulkan pajak daerah
- 3) Memberi pinjaman
- 4) Melakukan akses dari pasar dana perimbangan

Berikut yang termasuk kedalam tanggungjawab daerah, yaitu : (Ramadhani and Kamilah, 2021).

- 1) Memberikan penjagaan untuk seluruh bangsa yang ada di Indonesia
- 2) Memberikan kesejahteraan

- 3) Mencerdaskan bangsa
- 4) Ikut dalam tatanan global yang adil dan damai

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif tertentu. Selain melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dan mengunjungi BPKD Kota Subulussalam, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan melakukan observasi langsung. Diharapkan dengan menggabungkan beberapa teknik ini, kajian menyeluruh dapat dilakukan dan menunjukkan bahwa sistem dan praktik akuntansi aset tetap BPKD Kota Subulussalam perlu ditingkatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Kami berupaya mengungkap permasalahan yang sebenarnya apa adanya dengan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan studi lapangan. Tingkat penerapan antara teori yang berlaku dengan kondisi aktual objek kajian ditetapkan dengan menggunakan pendekatan ini. Data primer dan sekunder disertakan dalam sumber data. Sebagai bagian dari proses pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis data, antara lain, mengumpulkan data, mereduksi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aset daerah merupakan segala sumber daya perekonomian yang dimiliki oleh pemerintahan setempat. Dengan adanya aset daerah yang diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat dan mempermudah kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Kekayaan daerah dapat dinyatakan dalam satuan moneter yang memperhitungkan sumber pendapatan, dana pelayanan masyarakat, dan sumber daya yang diperoleh dari pemamfaatan sumber daya alam yang tersedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai cara mengelola kekayaan daerah dengan melakukan beberapa serangkaian acara serta tindakan yang memfokuskan kepada daerah tersebut dengan melakukan perencanaan, perencanaan atas kebutuhan, menyediakan anggaran, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan berguna; pengelolaan; menggunakan; keselamatan dan pemeliharaan; Evaluasi; menghapus; transfer; nasihat; memantau; kontrol; pengeluaran; dan menuntut ganti rugi. Setelah anda memahami konsep manajemen aset(Hermawati and Washliati, 2021).

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap merupakan deretan dari prosedur manajemen aset yang merupakan aktivitas spesifik pada bagian yang dipantau keputusan pemerintah yang telah ditetapkan pada Peraturan Dalam Negri No. 19 tahun 2016 (Wartuny, 2020)

Berdasarkan temuan wawancara dengan kepala bagian anggaran, pengelolaan aset tetap belum dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut, menyatakan bahwa :

1. Wakil Presiden dan para Menteri bekerjasama dengan Presiden RI untuk melakukan pembentukan pemerintah pusat yang sesuai dengan peraturan UUD 1945 yang berlaku.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tanggung jawab penunjang dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik. sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah orang yang bertugas pada urusan di daerah yang telah di tetapkan.
4. Walikota suatu wilayah kota, gubernur suatu provinsi, atau bupati suatu wilayah kabupaten adalah pemimpin daerah.
5. Kepala Daerah adalah orang yang mempunyai kemampuan mengawasi barang milik daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berfungsi sebagai wakil masyarakat daerah.
7. Pasar real estate daerah diawasi oleh sekretaris daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah, disebut juga Pengelola Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melakukan pengawasan barang milik daerah.
9. Perangkat daerah yang disebut SKPD membantu pimpinan daerah yang disebut DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang menjalankan kewenangan daerah.
10. Pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab kepala SKPD, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat tata usaha barang milik daerah.
11. Wakil yang berwenang memanfaatkan barang milik daerah dianggap sebagai pemakai barang.
12. Satuan kerja bertugas melaksanakan satu atau lebih program dalam satu SKPD.
13. Peraturan Daerah adalah sebagaimana diuraikan berikut ini peraturan daerah, bersama-sama dengan peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan sebagainya.

Siklus manajemen aset tetap terdiri dari berbagai kegiatan proses pengelolaan aset yang tetap. Dalam hal ini, ini juga merupakan langkah unik bagi daerah yang diatur oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tanggung jawab utama departemen aset adalah menjaga ketertiban administrasi aset dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung pengelolaan aset.

Kinerja, disebut juga prestasi kerja, adalah ukuran seberapa baik individu, unit, atau divisi

melaksanakan tugasnya dengan menggunakan kemampuan dan uraian tugas yang dimilikinya saat ini, yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan lembaga atau usaha. Kajian terhadap kinerja keuangan dilakukan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan konsep pengelolaan keuangan yang baik. (Sahfitri and Syafina, 2022).

Total waktu yang diperlukan untuk sejumlah prosedur kerja dalam pengelolaan aset tetap disebut sebagai ketepatan waktu. Meningkatkan efektifitas manajemen aset tetap tergantung berapa lama siklus pengelolaan aset tetap diselesaikan oleh SKPD Kota Subulussalam. Target waktu biasanya ditetapkan, pembuatan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah selama satu tahun merupakan ketepatan waktu dalam proses perencanaan kebutuhan dan anggaran. Dokumen RKBMD pengadaan dan dokumen pemeliharaan RKBMD merupakan bagian dari dokumen yang dibuat di Kota Subulussalam.

Kebutuhan perencanaan manajemen waktu harus menjadi bagian dari proses akuisisi properti daerah. Menurut temuan narasumber pembelian aset tetap bergantung pada anggaran pemerintah kota (Catherine Evalina Tarigan, Junawan, and Rahima Purba, 2022).

## **PEMBAHASAN**

Di dalam PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016 pada bagian Kedua Pasal 26 membahas tentang perencanaan kebutuhan daerah yang berisi:

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, yaitu:
  - a. Perencanaan pengadaan properti daerah
  - b. Perencanaan pemeliharaan aset daerah
  - c. perencanaan penggunaan barang milik daerah
  - d. Perencanaan peralihan hak milik daerah
  - e. Perencanaan penghapusan harta milik daerah
- (2) Dokumen perolehan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat rencana pengadaan barang dari daerah.
- (3) Memelihara barang milik daerah sesuai dengan maksud ayat. (1) Dokumen Pemeliharaan RKBMD menyebutkan huruf b.
- (4) Dokumen pemanfaatan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. memuat rencana pemanfaatan barang milik daerah
- (5) Dokumen Pemindahan Tangan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat rencana peralihan barang milik daerah.
- (6) Dokumen Penghapusan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menguraikan rencana penghapusan barang milik daerah.

Strategi penjadwalan kebutuhan pemeliharaan

properti yang berlokasi di kawasan Kota Subulussalam sudah mulai memadai atau cukup sesuai dengan landasan teori terkait. Tercatat ada 26 Daftar Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DRKPBD) yang dibuat oleh sekretariat daerah. Pengelola kemudian mengirimkannya ke daerah untuk dijadikan acuan daftar kebutuhan pemeliharaan properti di wilayah tersebut. (Islam, Mahmud, Batusangkar, and Barat, 2023).

Rencana perolehan barang resmi dari BPKD Kota Subulussalam tidak efektif atau tidak memenuhi kriteria yang bersangkutan. Pembelian barang lokal tersebut belum dilakukan pemeriksaan khusus oleh Dinas BPKD. Terbukti dengan adanya permintaan dari beberapa divisi daerah yang masi mengajukan pengadaan peralatan kantor seperti kipas angin/AC dan printer. Yang dimana dibebberapa divisi tersebut mengeluhkn adanya beberapa peralatan tersebut yang sudah rusak namun belum ada tindakan untuk service atau diganti.

Tercatat dalam rekapitulasi barang keneraca kota subulussalam memiliki nilai aset kurang lebih sekitar Rp. 2.227.769.607.422,27 M. Yang dimana tanah kurang lebih senilai Rp. 101.754.841.399,50 M dan peralan dan mesin kurang lebih senilai Rp. 303.829.797.759,77 M dan lainnya, ini merupakan angka yang cukup besar. Transparansi adalah satu hal mengacu pada keadaan di mana seseorang, perusahaan, organisasi, lembaga atau Organisasi dapat membuat informasi tersedia untuk umum untuk tujuan tersebut masyarakat atau informasi yang mudah dipahami, akurat, jujur, dan adil harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi juga dikaitkan dengan kenyamanan masyarakat untuk memperoleh informasi dari suatu otoritas, organisasi, atau ditugaskan untuk melakukan sth. Transparansi memainkan peran yang sangat penting dalam penciptaannya kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan organisasi yang berwenang (Yona Andreani and Laylan Syafina, 2022).

Dengan keterangan pasal di atas telah menyebutkan poin-poin yang dimana seharusnya setiap daerah harus memiliki perencanaan yang terperinci dan tepat. Adanya berbagai opini yang mengiring peneliti semakin yakin bahwa adanya dugaan bertambahnya hutang dan dugaan lainnya di Kota Subulussalam. Plt.Kepala Dinas DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) menyatakan bahwa bearadanya beberapa tagihan yang belum dilunasi masuk ke Kota Subulussalam, salah satunya iyalah yagihan Telkomsel. Berdasarkan hasil ulasan inspektorat Kota Subulussalam bahwa ini menjadi kewajiban daerah yang akan dibayarkan pada tahun 2023. Hal ini menyatakan bahwa masi banyaknya kelalaian dalam kepengurusan BPKD Kota Subulussalam.

Besarnya waktu yang dibutuhkan Kota Subulussalam untuk menyelesaikan perencanaan barang

milik daerah dan pembuatan barang milik daerah dan pembuatan dokumen RKBMD dapat menjadi masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran kebutuhan. Seharusnya RKBMD pengadaan dan pemeliharaan sudah di tetapkan paling lama setiap bulan juni, sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun terlepas dari itu, semua staf kantor kecamatan memiliki kewajiban penuh untuk melakukan pengamanan aset. Melalui hasil wawancara diketahui bahwa kepala ruangan memiliki hak dan tanggung jawab terhadap semua barang di ruangan yang dipimpinnya. Ini termasuk hak untuk mengusulkan kebutuhan barang di kamar mereka dan kewajiban untuk menjaga barang-barang di bagian bidang masing-masing. Masukan berupa biaya dapat dilihat dari besarnya anggaran yang diterima oleh pihak Kota Subulussalam untuk membiayai pengelolaan aset tetap.

## KESIMPULAN

Kota Subulussalam menganut pedoman PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016 dalam mengelola aset tetap pada bidang aset pada BPKD, yang mengatur pengelolaan pengelolaan barang milik daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses dan siklus pengelolaan dan pengamanan aset tepat dan barang milik daerah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang dianut. Hal tersebut terbukti bahwasanya masi banyak jangalan dan keluhan dari beberapa divisi lainnya. Serta penggunaan biaya tidak transparan dalam pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan Kota Subulussalam menjadi sumbermasalah biaya.

Pengamanan aset tetap sangat penting dilakukan oleh BPKD untuk mencegah kerugian atau penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan daerah. Dengan melakukan upaya pengamanan aset tetap yang baik dan teratur, BPKD Kota Subulussalam dapat memastikan bahwa aset tetap di Kota Subulussalam tertata dengan baik dan teratur, BPKD Kota Subulussalam dapat memastikan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal, serta menghindari kerugian atau penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan daerah.

## Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat, rezeki, dan rahmat-Nya, serta hidayah-Nya yang telah meridhoi penyusun agar dapat menyelesaikan tugas akhir jurnal yang berjudul Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subulussalam. Penulis sadar bahwa dalam mekanisme penulisan karya ilmiah ini mengalami beberapa kendala, tetapi berkat ridho dan keberkahan Allah SWT serta bimbingan dan arahan

dari beberapa pihak penulis dapat menyelesaikan kendala tersebut dengan baik. Tak luput pula terima kasih kepada kedua orang tua (ayah dan ibu) yang selalu medoakan dan memberi semangat meski terhalang jarak dan waktu. Serta dukungan dari abag, kakak dan adik yang selalu memeberi dorongan agar dapat menyelesaikan tugasini dengan baik.

Pembimbing Ibu Laylan Syafina telah meluangkan banyak waktunya dan memberikan ide-ide untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Para penguji juga menyumbangkan ide dan komentarnya agar jurnal ini dapat disajikan dengan lebih efektif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPKD Kota Subulussalam, apapun pangkatnya, yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman yang telah mendukung mereka selama masa percobaan ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Aleskerova, Y., Fedoryshyna, L., and Koval, N. (2018). Features of Loan Security for the Reproduction of Fixed Assets for Agricultural Purposes. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(4), 1–5. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-1-5>
- Arista, R., and Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah (Pud) Pasar Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 585–594. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.66>
- Catherine Evalina Tarigan, Junawan, and Rahima Purba. (2022). Analyzed of Fixed Asset Management Based on Effectiveness and Efficiency at Office of Subdistrict Head Binjai. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 2(2), 128–137. <https://doi.org/10.33258/economit.v2i2.662>
- Hermain, H., Daulay, A. N., and Enre, D. T. (2020). Analysis of Value for Money Income Budgets Government of the City of Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 115. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i2.843>
- Hermain, H., Nurlaila, Safrida.Lili, Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., ... Nurwani. (2019). Pengantar akuntansi 1. In *Madenatera* (Vol. 53).
- Hermawati, R., and Washliati, L. (2021). *Open Access Juridical Analysis of Regional Financial and Asset Management : A Study at Regional Financial and Asset Management Agency Office in Riau Islands Province*. (9), 60–68.
- Islam, B., Mahmud, U. I. N., Batusangkar, Y., and Barat, S. (2023). ( BKD ) *KABUPATEN TANAH DATAR JakSya : Jurnal Akuntansi Syariah*. 3(1), 77–83.

- Labasido, E. R., and Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2).
- Mardjani, A. C., Kalangi, L., and Lambey, R. (2015). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Pt. Utama Karya Manado. *Jurnal Emba*, 3(1), 1024–1033.
- Nasution, Y. S. J., and Siregar, R. (2020). the Influence of Minimum Wage and Manpower Toward Domestic Investment in North Sumatra. *Accounting and Business Journal*, 44–52.
- R, B., Bintari, S., and S, S. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Ramadhani, A. P., and Kamilah. (2021). Analisis Penggunaan Aset Tetap terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8219–8222.
- Sahfitri, D. I., and Syafina, L. (2022). Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan Dan Administrasi Di Kantor Pemerintahan Walikota Medan. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 253. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v6i1.1789](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1789)
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33.
- Yona Andreani, and Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>.